



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1130/DJU/SK.HK2/VIII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENCATATAN DAN
PENGELOLAAN BIAYA PERKARA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel diperlukan adanya ketertiban dan kepatuhan pencatatan pengelolaan biaya perkara di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
 - b. bahwa untuk mencapai hal diatas maka diperlukan adanya buku pedoman pencatatan dan pengelolaan keuangan perkara di lingkungan peradilan umum yang disusun sebagai suatu kebijakan oleh suatu tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cukup untuk menyusun pedoman tersebut;

Mengingat ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses ...



Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara;
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNPB Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountability (e-BIMA) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
17. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum;
19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 tentang Penginputan data keuangan perkara;

20. Surat ...



20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
21. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penginputan Data Keuangan Perkara pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum;
22. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
23. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Edaran Nomor 6/DJU.3/HM02.3/1/2020 terkait Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara online;
24. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENCATATAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PERKARA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pencatatan dan Pengelolaan Biaya Perkara Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025.

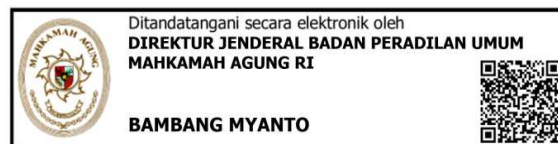
KEDUA : Peserta dibebaskan tugas dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 20 s.d 22 Agustus 2025.

KETIGA ...



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 Agustus 2025



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor 1130/DJU/SK.HK2/VIII/2025
Tanggal 12 Agustus 2025

**PESERTA KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENCATATAN DAN
PENGELOLAAN BIAYA PERKARA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A	GOL/ RUANG	JABATAN	SATKER
	NIP			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H., M.H. NIP. 196603171991031001	IV/d	Panitera	Pengadilan Tinggi Surabaya
2.	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. NIP. 196411101987021001	IV/d	Panitera	Pengadilan Tinggi Jakarta
3.	Muhammad Anis, S.E., Ak., M.Ak. NIP. 197805052006041002	IV/c	Auditor Ahli Madya	Badan Pengawasan MA RI
4.	Imam Purnomo, S.E., Ak. NIP. 198109092006041002	IV/c	Auditor Ahli Madya	Badan Pengawasan MA RI
5.	Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H. NIP. 197012271992031002	IV/c	Panitera	Pengadilan Negeri Semarang
6.	Budi Setioko, S.H., M.H. NIP. 197509022001121003	IV/b	Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Wilayah Hukum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
7.	Iyus Yusuf, S.H., M.H. NIP. 196901031989031002	IV/b	Panitera	Pengadilan Negeri Surabaya
8.	Meilyna Dwijanti, S.H., M.H. NIP. 196705241990032002	IV/b	Panitera	Pengadilan Negeri Yogyakarta
9.	Imam Sukardi, S.H., M.Hum. NIP. 197401091993031001	IV/b	Panitera	Pengadilan Negeri Malang
10.	Sigit Indriyatno, S.H., M.H. NIP. 197404151994031001	IV/b	Panitera	Pengadilan Negeri Klaten
11.	Diah Purwadani, S.H.,M.H NIP. 198405152007042001	IV/a	Panitera	Pengadilan Negeri Bantul
12.	Tri Indroyono, S.E., S.H., M.H. NIP. 197207202005021002	IV/a	Panitera	Pengadilan Negeri Bangil
13.	Wahyu Probo Yulianto, S.H., M.H. NIP. 197507152001121001	IV/a	Panitera	Pengadilan Negeri Kepanjen
14.	Berly, S.E., S.H. NIP. 198001182006041003	IV/a	Panitera	Pengadilan Negeri Kediri



NO	N A M A	GOL/ RUANG	JABATAN	SATKER
	NIP			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
15.	I Nyoman Sudarsana, S.H. NIP. 196706111993031002	IV/a	Panitera	Pengadilan Negeri Kraksaan
16.	Ani Windarti, S.H., M.B.A. NIP. 198410212006042002	IV/a	Panitera	Pengadilan Negeri Wonosari
17.	Sri Hartaty, S.H., M.Si. NIP. 196603231994032003	IV/a	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
18.	Herry Arifianto, S.H., M.H. NIP. 198102252007041001	IV/a	Jurusita	Pengadilan Negeri Surabaya
19.	Mohan Ayusta Wijaya, S.H. NIP. 198009212003121001	III/d	Panitera	Pengadilan Negeri Pasuruan
20.	Bambang Sapto Utomo, S.E. NIP. 197105201998031009	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
21.	Aditya Widyartadi, S.Kom. NIP. 198612042015031004	III/c	Kepala Seksi Statistik	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
22.	Elis Khulaeli Yanti, S.Si., S.H. NIP. 198806182009122003	III/c	Jurusita Pengganti	Pengadilan Negeri Malang
23.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom. NIP. 198708192020121002	III/b	Pranata Komputer	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
24.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom. NIP. 198508182020121004	III/a	Pranata Komputer	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
25.	Muhammad Rendy Priambodo, A.Md. NIP. 199405312020121005	II/d	Arsiparis Terampil	Pengadilan Tinggi Surabaya
26.	AUDITOR BPK WILAYAH JAWA TIMUR	-	Auditor	Badan Pemeriksa Keuangan RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2025

